



**PENGARUH TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

Skripsi

Dibuat Oleh:
Tia Mutriani
0221 18 306

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Agustus 2023

**PENGARUH TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA.)



Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA., CCSA., CA.,CSEP.,QIA.)

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Arief', is written over the name of the Program Study Head.

**PENGARUH TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

Skripsi

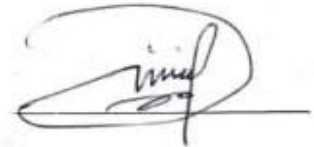
Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023

Tia Mutriani
022118306

Disetujui

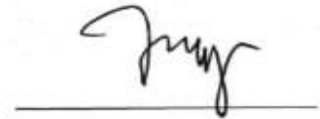
Ketua Penguji Sidang

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA.)




Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA.)



Anggota Komisi Pembimbing

(Sujatmiko Wibowo, ST., M.Ak.)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Mutriani
NPM : 022118306
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Agustus 2023



Tia Mutriani
022118306

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang menggunakan dana tau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

TIA MUTRIANI, 022118306, Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pemerintah Pada Daerah Kabupaten Pandeglang. Di bawah Bimbingan: ASEP ALIPUDIN dan SUJATMIKO WIBOWO, 2023.

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan public. Isu mengenai kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum memperlihatkan hasil yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan agar memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud dari pelaksanaan konsep otonomi. Perwujudan transparansi merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam hal otonomi daerah dengan menekankan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Sehingga dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat memberikan masukan ataupun kritikan kepada pemerintah dan apabila kritik dan saran ditindaklanjuti pemerintah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory survey. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup SKPD di Kabupaten Pandeglang dengan dan 50 orang responden. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis, menggunakan *SPSS Ver. 24*.

Hasil analisis variabel penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: Transparansi, Kinerja Pemerintah.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang sangat keras dan luar biasa untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Namun, skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang di sekeliling yang telah mendukung dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua saya dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis dan mendukung penulis selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak. Selaku ketua komisi pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Sujatmiko Wibowo, Ak, M.M. Selaku anggota komisi yang telah membimbing dengan memberikan waktu, arahan dan berbagai pengalaman kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses pembelajaran sampai pembuatan skripsi ini.
10. Kepada teman teman saya Risna Dwi Haryanti, Seny Yuliani, Gheatama, Salsabila Fakhirah K, dan Mega Mustika, yang telah memberikan semangat dan mewarnai pola pikir penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Trisnawati, Bella Syahira, Tasya Aprilia, Novia A, dan NabellaRatri, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Muthia Risqilah dan Tatang H, teman seperjuangan yang memberikan semangat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kelas Akuntansi A angkatan 2018 atas kerjasama dan dukungannya selama proses perkuliahan ini
14. Teman yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang menjadi teman keluh kesah yang mendukung dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, izinkan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk mengoreksi dan melengkapi penelitian penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi yang berguna bagi kita semua, serta bisa menjadi tambahan literatur bagi penelitian berikutnya.

Bogor, Agustus 2023

Penulis

Tia Mutriani

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .	iii
PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	5
1.4.2. Kegunaan Akademis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Akuntansi Sektor Publik	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	6
2.1.3 Elemen-Element Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.5 Pemerintah Pusat	9
2.1.6 Pemerintah Daerah	10
2.2. Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.2.1. Pengertian Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.2.3. Laporan Keuangan Daerah.....	14
2.3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	17
2.3.1. Pengertian Transparansi	17
2.3.2. Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan	17
2.3.3. Regulasi Transparansi	18

2.3.4.	Manfaat Transparansi Keuangan	19
2.3.5.	Indikator Transparansi	19
2.4.	Kinerja Pemerintah Daerah	19
2.4.1.	Pengertian Kinerja Pemerintah	19
2.4.2.	Manfaat Kinerja Organisasi Pemerintah	20
2.4.3	Pengukuran Kinerja	21
2.4.4	Pengukuran Kinerja Value For Money	22
2.5.	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	22
2.7.1.	Penelitian Terdahulu	23
2.7.2.	Kerangka Pemikiran.....	28
2.6.	Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	30
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6.	Metode Pengumpulan Data	32
3.7.	Metode Analisis data.....	32
3.7.1.	Uji Kualitas Data	32
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	33
3.7.3.	Uji Regresi Linear Sederhana.....	34
3.7.4.	Uji Hipotesis.....	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Pandeglang	35
4.1.2.	Demografi Kabupaten Pandeglang	35
4.1.3.	Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang	36
4.1.4.	Geografis Kabupaten Pandeglang	36
4.1.5.	Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.....	37
4.2.	Hasil Pengumpulan Data.....	41
4.2.1.	Deskripsi Karakteristik Responden	41
4.2.2.	Deskripsi Data Variabel.....	43
4.2.3.	Distribusi Jawaban Responden	44
4.3.	Analisis Data	48
4.3.1.	Uji Kualitas Data.....	48
4.3.2.	Uji Asumsi Klasik	49
4.3.3.	Uji Analisis Regresi Linier Sederhana.....	53
4.3.4.	Uji Hipotesis.....	54
4.4.	Pembahasan Dan Interpretasi Hail	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	59

5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 4.1	Deskripsi Proses Pengumpulan Data Responden	41
Tabel 4.2	Deskripsi Karakteristik Jenis Kelamin Responden	41
Tabel 4.3	Deskripsi Strata Pendidikan Responden	42
Tabel 4.4	Deskripsi Lama Kerja Responden	42
Tabel 4.5	Instrumen Skala Likert.....	43
Tabel 4.6	Mutu Kelas Interval	44
Tabel 4.7	Deskripsi Data Tingkat Transparansi	44
Tabel 4.8	Deskripsi Data Kinerja.....	46
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Transparansi.....	48
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Kinerja	49
Tabel 4.11	Hasil Uji Reabilitas Transparansi	49
Tabel 4.12	Hasil Uji Reabilitas Kinerja.....	49
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.15	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	53
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	54
Tabel 4.17	Hasil Uji Parsial (uji t).....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1	Geografis Kabupaten Pandeglang.....	36
Gambar 4.2	Struktur perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pandeglang ..	37
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas Histogram- Kinerja dan Normal	51
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas Histogram- Kinerja dan Normal Probability Plot Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang	51
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedasitas Pemerintah Kabupaten Pandeglang	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	64
Lampiran 2 Angket Penelitian	67
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	69
Lampiran 4 Surat Izin	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mewujudkan *good governance*. Dalam *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegakan hukum

Dalam penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan baik. Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara. Dalam pengelolaan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan transparansi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam peraturan dimaksud diatur bahwa informasi publik disampaikan secara berkala kepada masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau dan berbiaya rendah. Pemerintah daerah menjadi salah satu lembaga yang wajib mengungkapkan informasi tersebut. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik, seperti internet.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/ SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dalam *website* resmi pemerintah daerah. Menu tersebut digunakan untuk mempublikasikan dokumen penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban daerah. Peraturan lainnya dalam Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Melalui peraturan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah (gubernur dan walikota/ bupati) untuk mempublikasikan dokumen terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui website masing-masing pemerintah daerah.

Manfaat dari transparansi pengelolaan keuangan adalah meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Upaya yang dilakukan mengenai transparansi pemerintah pusat maupun daerah kepada *stakeholder* adalah dengan penyajian laporan keuangan secara periodic sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (DJPB.Kemenkeu, 2019 dan keterbukaan informasi kepada publik (Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Kinerja Pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (BPPK Depkeu, 2014). (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa kinerja pemerintah suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah bersangkutan. Oleh karena itu kinerja pemerintah perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat diberikan suatu pernyataan keberhasilan pemerintah daerah dan dapat diidentifikasi perbaikan jika memang diperlukan. Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007) dapat berdasarkan *value for money*. *Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Kemudian menurut (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya yang berjudul akuntansi sektor publik menyebutkan bahwa penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal, yaitu: membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinnya, dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ditambahkan lagi oleh (Mardiasmo, 2018) bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas pemerintah daerah serta

pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya.

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan public. Isu mengenai kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum memperlihatkan hasil yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Ombusman,RI). Masyarakat menuntut pemerintahan agar memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud dari pelaksanaan konsep otonomi. Perwujudan transparansi merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam hal otonomi daerah dengan menekankan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Sehingga dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat memberikan masukan ataupun kritikan kepada pemerintah dan apabila kritik dan saran ditindaklanjuti pemerintah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Kabupaten Pandeglang adalah menjadi salah satu daerah tertinggal di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam empat tahun berturut turut 2016-2020 pada LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI karena hal ini Kabupaten Pandeglang mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Apabila pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP dapat dikatakan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Kewajaran angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut sudah baik. Dengan kinerja pemerintah yang semakin baik maka pengelolaan keuangan negara menjadi lebih berkualitas yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Warta BPK Kaleidoskop 2014). Dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang pun memperoleh peringkat BB atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Secara 3 kali berturut-turut 2018-2020 ini menandakan bahwa Pemda Kabupaten Pandeglang terus konsen dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah.

Permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah Organisasi Pemerintah Daerah masih belum mempublikasikan laporan mengenai keuangan pada website resmi terkait. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang, Girgijantoro mengatakan bahwa *website* di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang banyak yang tidak aktif. Dimana dari 33 OPD terdapat lima OPD yang tidak memiliki laman resmi

sedangkan dua puluh delapan OPD lainnya belum semua optimal. Akibatnya informasi mengenai dinas yang bersangkutan tersendat (Banten Hits, 2019)

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana setiap badan publik diwajibkan menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam peraturan dimaksud diatur bahwa informasi publik disampaikan secara berkala kepada masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau dan berbiaya rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas dapat dilihat dari segi variabel, lokasi, subyek penelitian dan periode penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan transparansi pengelolaan keuangan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

Melihat permasalahan mengenai transparansi pengelolaan keuangan yang belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintah kabupaten Pandeglang. Maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum dengan mudah memperoleh informasi mengenai keuangan ataupun *non* keuangan dikarenakan OPD yang tidak aktif dalam memberikan informasi pada website resmi
2. Masyarakat belum dapat mudah mendapatkan informasi sehingga terhambat memberikan kritik dan saran untuk pemerintah dikarenakan informasi keuangan maupun non keuangan dikarenakan terdapat OPD yang tidak aktif pada *website* resmi.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ?
3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh pada tingkat kinerja pada daerah Kabupaten Pandeglang

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan maksud tujuan yang sebelumnya telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh pada tingkat kinerja pada daerah Kabupaten Pandeglang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya

1.4.1 Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam transparansi pengelolaan keuangan kabupaten Pandeglang

1.4.2 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemerintahan daerah terutama mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah serta hubungannya dengan tingkat kinerja pemerintah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya konsentrasi dibidang akuntansi sektor publik .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Untuk memudahkan memahami Akuntansi Sektor Publik berikut akan diuraikan pengertian, ruang lingkup, elemen-elemen, dan tujuan Akuntansi Sektor Publik, sebagai berikut :

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo, 2009) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi ada wilayah publik (Biduri, 2018)

Berdasarkan pengertian akuntansi sektor publik di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan teknis dan analisis informasi publik yang dilakukan oleh organisasi sektor publik guna pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam mengelola dana masyarakat.

2.1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, serta organisasi-organisasi publik *nonprofit*. Dimana, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat diatur dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik.

Menurut Bastian (2019) Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Undang-Undang (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) hingga diatur menggunakan Peraturan Daerah/Perkada yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 dan PP Nomor 71 Tahun 2010) dan dalam Permendagri/Kepmendagri.

3. Akuntansi Partai Politik

Standar akuntansi keuangan partai politik yang berlaku saat ini, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45): Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

4. Akuntansi LSM

Menurut Bastian (2019: 72), “Akuntansi LSM merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana. akuntansi LSM sebagai sarana informasi mengenai penggunaan serta pengelolaan sumber daya bagi lembaga pemberi dana maupun publik.

5. Akuntansi Yayasan

Yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan, Bastian (2019). Dalam hal ini digunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah Atau Perguruan Tinggi

Akuntansi pendidikan tinggi merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai tolok ukur kinerja, media akuntabilitas dan transparansi public guna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait. Aturan mengenai tujuan, prinsip, sumber pendanaan, dan pengelolaan keuangan pendidikan tinggi sebagian kecil diatur juga dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. PSAK 45 mengatur tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba termasuk akuntansi perguruan tinggi

7. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Atau Pura.

Dalam hal ini digunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang diterbitkan oleh ikatan Akuntan Indonesia yang dapat dijadikan dasar untuk seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK No. 45 yang menjadi karakteristik untuk entitas nirlaba ini adalah bahwa sumber daya entitas berasal dari para penyumbang dengan tidak mengharapkan adanya hasil, imbalan atau keuntungan komersial.

2.1.3 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik menurut Bastian (2019) adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari beberapa elemen yang diantaranya sebagai berikut.

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

2. Penganggaran Publik

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program, serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan setelah anggaran dilaksanakan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja kegiatan, serta kemajuan realisasi pembiayaan. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial.

6. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau instansi pengelola aset negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

7. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi yang ada didalamnya sangat bermanfaat sebagai alat pengendalian manajemen ataupun sebagai transparansi publik. Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Sujarweni (2015:2) adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

2.1.5 Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintah pusat merupakan badan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah dalam suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan menteri negara. Presiden, wakil presiden, dan menteri negara memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing.

Dilansir dari buku Ilmu Negara (2019) oleh Max Boli Sabon, terdapat tiga pengertian pemerintah, yakni:

1. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum.
2. Pemerintah dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) bersama-sama dengan menteri-menterinya sebagai organ eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet.
3. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara. Contoh: presiden, raja, atau sultan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

2.1.6 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah.

2.2 Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 6 menjelaskan bahwa sumber penerimaan pendapatan asli daerah yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan instansi pemungut, Pajak Daerah terbagi menjadi:

Pajak Provinsi, yang meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pengertian Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi menurut UU No.28 Tahun 2009 pasal 108 ada tiga, yaitu:

- a. Jasa Umum

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 109, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b. Jasa Usaha

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 126, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Perizinan Tertentu

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 pasal 140, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2014) mengungkapkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang No 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi atau potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

- f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sama dengan halnya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan serta pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa segala bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah wajib dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan serta pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, yang kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah serta mewakili dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban sangat diperlukan, karena proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kepada publik untuk menjalankan roda pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah di atur dalam undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK).

Terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono 164 – 177) :

1. Relevan Kemampuan informasi dalam membentuk pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk fasilitas proses pengambilan keputusan atau kebijakan .
2. Andal Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketetapan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang di ukur)
3. Dapat dibandingkan Kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perangkat fenomena ekonomik..
4. Dapat dipahami Ketidakpihakan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu atau menghindari akibat konsekuensi.

Menurut Mardiasmo (2018 :162). Tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban *accountability* dan pengelolaan *stewardship*.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasional. D

Dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan laporan keuangan adalah;

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai berbagai entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas laporan yang berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelapor apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah di dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos dalam Laporan SAL, sebagai berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang dan Ekuitas dana dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancer dan ekuitas dana investasi.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan tersebut. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3 Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Untuk memudahkan memahami Transparansi Pengelolaan Keuangan berikut akan diuraikan pengertian, regulasi, manfaat dan, sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut Bappenas RI transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan menurut (Kurniawati, 2016) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Regulasi Transparansi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pemerintah berkomitmen untuk mengelola keuangannya berpedoman pada pilar-pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan sikap keadilan, kepatutan. Dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007.

Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyajian laporan keuangan daerah. Penyajian Laporan Keuangan yang baik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ini bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.3.4 Manfaat Transparansi Keuangan

1. meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada masyarakat
2. meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*)
3. pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan program dan kegiatan sehingga membutuhkan dukungan masyarakat
4. masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan untuk mengetahui.

2.4.5 Indikator Transparansi

Sedangkan menurut (Krina., 2003) dalam (Reza, 2018) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan menurut (Kristianten.2006) dalam (Sangki et al., 2017) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk memudahkan memahami Kinerja Pemerintah, berikut akan diuraikan pengertian, manfaat, dan pengukuran kinerja pemerintah, sebagai berikut :

2.4.1 Pengertian Kinerja Pemerintah

PP No 8 Tahun 2016 kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur . Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja (performance) menurut (Mahsun, 2018) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/progam/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. (Bastian,2016) dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah adalah tingkat pencapaian organisasi dalam mewujudkan visi,misi organisasi yang telah ditetapkan.

2.4.2 Manfaat Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Kinerja organisasi daerah memiliki arti penting bukan hanya kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat dan para penyumbang dana, tetapi juga penting terhadap pemerintah daerah itu sendiri, terlebih kepada DPRD.

1. Manfaat kinerja organisasi pemerintah daerah :

1. sebagai *feedback* kepala daerah untuk *evaluasi* kinerja pemerintah daerah dimasa mendatang
2. mengetahui SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang
3. membangkitkan motivasi kinerja kela SKPD dan jajarannya untuk produktif
4. untuk merumuskan kembali mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang lainnya yang di anggap memiliki nilai lebih efektif berikut dengan penganggarannya dan metode pelaksanaan yang lebih efisien
5. melalui laporan kinerja, pemerintah daerah dapat memberitahukan capaian keberhasilan/kegagalan dengan jujur dan menjelaskan factor kegagalannya kepada DPRD,masyarakat,donator dan kepada pemerintah daerah di atasnya
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa dana yang publik yang dikelola telah dipergunakan sesuai dengan amanah yang diberikan

2. Manfaat kinerja organisasi pemerintah daerah bagi masyarakat

1. melalui laporan kinerja pemerintah daerah , masyarakat dapat memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam pencapaian visi misinya
2. sebagai bahan dalam mempertimbangkan pilihan politik dimasa datang
3. bahan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama mengenai mutu pelayanan publik kepada masyarakat
4. sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan pendapat dalam proses perencanaan pembangunan dari bawah

Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2007:122) antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), penilaian terhadap suatu kinerja bertujuan untuk:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.4.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun,2012),.

Menurut (Bastian, 2019) pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa kualitas barang dan jasa hasil kegiatan. dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja menurut (Mahsun,2007) dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik, pengukuran kinerja dapat berdasarkan *value for money*. *Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Berikut penjelasan mengenai *value for money* yang digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja Value for Money

1. Pengertian Value For Money

Value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. (kpbu.kemenkeu,2022). Dalam hal ini *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

1. Ekonomis : Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output.

2. Manfaat Implementasi Value For Money

Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2016) antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik,
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik dapat membantu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil penelitian
1	(Putra, 2018)	Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi)	Variabel independent 1.Pengawasan Fungsional, 2.Akuntabilitas Publik Dan 3.Peningkatan Pelayanan Publik Variabel dependen: 4.Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. (2) Pengawasan fungsional, Akuntabilitas publik, dan Peningkatan pelayanan publik secara parsial berpengaruh Terhadap kinerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. (3) Pengaruh Penyawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi
2	(Nurlailah et al., 2020)	Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi	transparansi pengelolaan desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan desa di Kabupaten Sigi termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dengan nilai indeks 70,53 persen.

3	(Umar, 2018)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Ispektorat Aceh	Variabel independen: 1.akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2.transparansi pengelolaan keuangan Variabel dependen: Kinerja instansi Inspektorat Aceh	Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh
4	(Widajaton & Kristiastuti, 2020)	<i>The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance</i>	Variabel independen: 1. <i>Regional Financial Supervision,</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Transparency</i> Variabel dependen <i>Regional Financial Management on Local Government Performance</i>	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pemerintah Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
5	(Novatiani et al., 2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi	Variabel independen: 1.Transparansi 2.Akuntabilitas Variabel dependen: Kinerja instansi	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Bandung Barat.

		Pemerintah		
6	(Elkha & Wahidawati, 2020)	Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel independen: 1. Pengendalian Internal 2. Akuntabilitas, Dan 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah OPD maka kinerja pemerintah semakin meningkat.
7	(Nasution, 2018)	Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Variabel independen 1. Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. Akuntabilitas Dan 3. Transparansi Variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan
8	(Jatmiko, 2020)	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Variabel independen: 1. Pengawasan Internal 2. Akuntabilitas, Dan 3. Transparansi Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah	Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
9	(Putu & Indraswarawati, 2021)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan	Variabel Independen 1. Pengawasan Keuangan Daerah, 2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

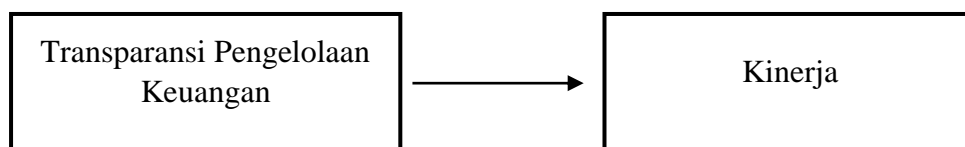
		Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Survei Pada Opd Kabupaten Klungkung)	3.Akuntabilitas Variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan meningkat.
10	(Nasrun, 2019)	Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Variabel Independen <i>Good Governance</i> Variabel dependen : Kinerja Keuangan	<i>Good governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
11	(Laga, 2021)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Variabel Independen 1.Pengawasan Keuangan Daerah 2. Akuntabilitas 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 2.549 sedangkan nilai signifikasinya adalah sebesar 0.017
12	(Mbipi et al., 2020)	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Saverius	Variabel Independen 1.Pengelolaan Keuangan Daerah 2. <i>Good Governance</i> Variabel dependen Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Transparansi pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13	(Lestari, 2020)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan	Variabel Independen 1.Sistem Akuntansi	Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

		Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Opd Kabupaten Kendal)	Keuangan Daerah, 2.Akuntabilitas, 3.Transparansi, 4. <i>Good Governance</i> Variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah	daerah. Hal ini dikarenakan bahwa hasil LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang ada di Kabupaten Kendal tidak dipublikasikan, serta sulitnya untuk mengakses LKPD tersebut. Berdasarkan
14	(Purnama & Nadirsyah, 2016)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya	Variabel Independen 1.Pengawasan Keuangan Daerah, 2.Akuntabilitas, 3.Transparansi Pengelolaan Keuangan Variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah	Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
15	(Guasmin & Febrianti, 2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu	Variabel Independen 1.Penyajian Laporan Keuangan Daerah 2.Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel dependen Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlailah (2020), Umar (2018), Widjatun&Kristiastuti (2020), Novatiani (2019), Elkha & Wahidawati (2020), Nasution (2018), Jatmiko (2020), Putu & Indraswarawati (2021), Nasrun (2019), Laga 2021., Mbipi et al (2020), Lestari (2020), Purnama & Nadirsyah (2016), Gusmin&Febrianti (2019) yaitu variabel independen Transparansi Pengelolaan Keuangan dan variabel dependen Kinerja Pemerintah dan dengan Putra, (2018) berbeda metode penelitian yang digunakan.

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi. Perwujudan transparansi merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam hal otonomi daerah dengan menekankan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal tersebut dapat memberikan masukan ataupun kritikan yang diberikan kepada pemerintah dan apabila masukan dan kritikan yang dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah secara maksimal maka kinerja pemerintah pun akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah terkait.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah

2.5.2.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian (Widajatun & Kristiastuti, 2020) transparansi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Transparansi penting diterapkan. Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Transparansi dalam pengelolaan pemerintah dapat menekankan kepada pemerintah untuk terbuka akan hak-hak masyarakat dalam menerima informasi yang akurat dan jujur mengenai kebijakan dan program pemerintah. Dengan demikian pemerintah akan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kinerja

pemerintah daerah pun akan meningkat (Jatmiko, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang baik
- H₂ : Tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang baik
- H₃ : Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh Terhadap Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan metode Eksplanatory Survey, Yaitu suatu survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis (Sugiyono,2016).

3.2 Objek, Unit Analisis,Dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua variabel yaitu tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kinerja pemerintah daerah untuk diketahui bagaimana pengaruh diantara dua variabel tersebut.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan unit analisis tingkat kabupaten. Karena penelitian ini tingkat agresi data yang diteliti merupakan tingkat kabupaten.

Lokasi penelitian ini berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang telah di tetapkan.

3.4 Operasional Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah varibel independent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). dan variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Pada penelitian ini Variabel independent yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dependen adalah tingkat kinerja pada pemerintah kabupaten Pandeglang.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap
Tingkat Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
----------	-----------	--------	-------

<p>Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>a. Kemudahan untuk mengakses Informasi publik</p> <p>b. Kelengkapan laporan mengenai informasi publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya akses untuk informasi publik (<i>website</i>, koran, dsb) • Dokumen anggaran mudah diakses • Terakomodasinya suara rakyat • Adanya Informasi Keuangan • Laporan pertanggungjawaban tepat waktu 	<p>Ordinal</p>
<p>Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Efisien</p> <p>b. Efektif</p> <p>c. Ekonomis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu • Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja • Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau pelayanan tepat sasaran • Menghindari pengeluaran yang boros • Cermat dalam pengadaan sumber 	<p>Ordinal</p>

		daya .	
--	--	--------	--

3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Pengambil sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2016). *Purposive Sampling* pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan pegawai SKPD pada bagian keuangan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuisoner) kepada pegawai SKPD bidang keuangan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner di mana menggunakan skala likert 5 poin (STS) sangat tidak setuju, (TS) tidak setuju, (N) Netral, (S) Setuju, (ST) sangat setuju, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016).

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Sebelum memulai pengelolaan data, peneliti melakukan penyebaran kuisoner kepada para responden setelah responden memberikan hasilnya kemudian masukan ke aplikasi SPSS kemudian diolah dengan analisis statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis.

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji validitas adalah suatu ukuran untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisoner yang telah dibuat. Suatu kuisoner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisoner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut. (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuisoner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuisoner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila setiap jawaban dari responden terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronsbach's Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronsbach's Alpha $> 0,60$. Sebaliknya jika nilai Cronsbach's Alpha $< 0,60$ maka butir pertanyaan tidak reliabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi Normal atau berada dalam sebaran Normal. Distribusi Normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean dan median berada dipusat. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi Normal atau berdistribusi tidak Normal. Uji Normalitas dilakukan pada variabel dependen dan independen. Data akan sah apabila bebas dari bias dan berdistribusi normal. Cara analisis Normalitas data pada penelitian ini menggunakan kolmogorof-smirNov.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016:134) memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linier apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadinya Homoskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas melalui dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika

ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinier pada penelitian.

Ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala Multikolinieritas, pada modul ini hanya diperkenalkan 2 cara, yaitu VIF dan Uji Korelasi.

3.7.3 Uji Regresi Linear Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ predictor (X) dengan satu variabel tak bebas/ response (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lainnya.

Rumus Regresi:

$$\hat{Y} = a + bx$$

Dimana:

Y = Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah

X = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Arah Regresi

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien ini disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi variabel independen. Untuk menyatakan besar kecilnya variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

KD = Nilai koefisien determinasi

r = Nilai koefisien korelasi

2. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5% . pengapian Kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang diberikan nilai α 5% dengan ketentuan :

- Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak.
- jika nilai Sig > α maka Ho diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai mana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Menurut Staatsblad Nederlands Indie No. 81 tahun 1828, Keresidenan Banten dibagi tiga kabupaten: Kabupaten Utara yaitu Serang, Kabupaten Selatan yaitu Lebak dan Kabupaten Barat yaitu Caringin. Kabupaten Serang dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) kewedanaan. Kesebelas kewedanaan tersebut yaitu: Kewedanaan Serang (Kecamatan Kalodian dan Cibening), Kewedanaan Banten (Kecamatan Banten, Serang dan Nejawang), Kewedanaan Ciruas (Kecamatan Cilegon dan Bojonegara), Kewedanaan Cilegon (Kecamatan Terate, Cilegon dan Bojonegara), Kewedanaan Tanara (Kecamatan Tanara dan Pontang), Kewedanaan Baros (Kecamatan Regas, Ander dan Cicandi), Kewedanaan Kolelet (Kecamatan Pandeglang dan Cadasari) Kewedanaan Ciomas (Kecamatan Ciomas Barat an Ciomas Utara) dan Kewedanaan Anyer (tidak dibagi kecamatan). Menurut sejarah, pada tahun 1089 Banten terpaksa harus menyerahkan wilayahnya yaitu Lampung kepada VOC (Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Muhamad menyusun strategi untuk melawan kekuasaan VOC. Sultan Muhamad menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk menyusun kekuatan. Kekuatan kesultanan dipencar kepelosok Pandeglang seperti di kaki gunung Karang dan di pantai.

Pandeglang dalam percaturan sejarah kesultanan Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa terlihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Semua itu bukan hanya membekas pada benda yang berwujud, tapi juga membekas pada kultur kehidupan masyarakat Pandeglang.

Peninggalan sejarah kesultanan Banten masih nampak terlihat dari seni budaya yang ada di Pandeglang. Misalnya saja, Pandeglang merupakan Kota Santri dan Pandeglang terkenal dengan daerah yang historis, patriotis dan agamis. Julukan ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya, akan tetapi merupakan bentangan sejarah telah mencatatnya.

4.1.2 Data Demografi

Berdasarkan data administrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.194.911 jiwa yang terdiri dari laki-laki 610.412 jiwa dan perempuan sebanyak 584.499 jiwa yang tersebar di 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dengan jumlah tersebut, kepadatan penduduk yang dialami oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 435 penduduk per kilometer persegi. Jika diperkirakan, satu kilometer persegi wilayah di Kabupaten Pandeglang dihuni oleh 435 penduduk.

4.1.3 Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang

- Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Menuju Pandeglang Berkah, Berdaya Saing Dan Sejahtera

- Misi Pemerintah Kabupaten Pandeglang

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah.

4.1.4 Geografis Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Kondisi geografi daerah di Kabupaten Pandeglang meliputi karakteristik wilayah, kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan eksisting Kabupaten Pandeglang.

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebesar 2.746,81 km² atau sebesar 27.468.100 Ha, yang terbagi ke dalam 35 kecamatan dan 339 desa/kelurahan. Luas Kabupaten Pandeglang mengambil porsi sebesar 28,43% dari luas total Provinsi Banten, hal ini menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten terbesar ke dua di Provinsi Banten. Secara astronomis, Kabupaten Pandeglang berada pada 6o21'00"-7o10'00" Lintang Selatan dan 105o48'00"-106o11'00" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota sekitarnya, yaitu:

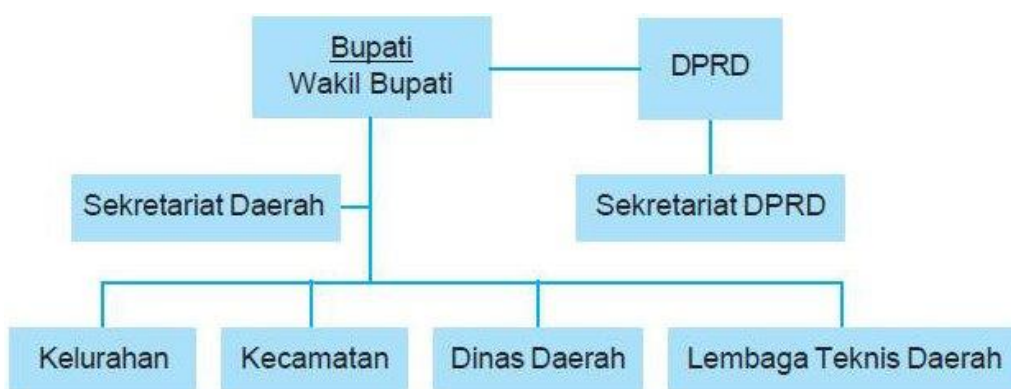
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 4.1
Geografis Kabupaten Pandeglang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki luas administrasi paling besar kedua setelah Kabupaten Lebak, dengan persentase sebesar 28,43% dari luas Provinsi Banten. Wilayah yang luas ini sebagian merupakan kontribusi dari pulau-pulau yang berada di Kecamatan Labuan serta Kawasan Tanjung Lesung. Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah pulau-pulau kecil tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, dengan total sebanyak 51 pulau kecil. Kecamatan Labuan sendiri berkontribusi sebanyak 29 pulau kecil dari total pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dalam Angka 2017, Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan Kab/Kota lainnya di Provinsi Banten, yaitu sebesar 307 km, dengan sebagian besar kecamatannya berhadapan dengan laut

4.1.5 Pemerintah Kabupaten Pandeglang



Gambar 4.2
Struktur Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

Tugas Pokok, Kedudukan dan fungsi masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Bupati/Walikota mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
2. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menghormati kedaulatan rakyat.
4. Menegakan seluruh peraturan perundangan.
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah Bersama DPRD.

Wakil Bupati/Wakil Walikota mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati/Walikota dalam menjalankan kewajibannya.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota
2. Sekretariat Daerah;

Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD. menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b) pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4. Inspektorat

Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- a. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : perencanaan program pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Dinas/Badan Daerah

Dinas/Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas/Badan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas/Badan dan cabang Dinas/Badan.

Dinas Daerah terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 6) Dinas Pekerjaan Umum
- 7) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 8) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 10) Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
- 11) Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
- 12) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 14) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 15) Dinas Kehutanan
- 16) Dinas Pertambangan dan Energi
- 17) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Lembaga Teknis Daerah :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 4) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 5) Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Kantor Lingkungan Hidup
- 7) Kantor Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- 8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah Berkah
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah Labuan.
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah daerah sebagai pelaksana tekni kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai dengan kewilayahannya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2) pengoordinasian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan kebersihan
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- 8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

e. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan pembangunan

- 2) pengoordinasian kesejahteraan sosial
- 3) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan
- 5) pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Responden Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner kepada bidang keuangan/akuntansi pada SKPD di Kabupaten Pandeglang. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan membagikan 50 kuesioner yang di sebar dan yang kembali sebanyak 47 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Juli 2022-Agustus 2022. Berikut ini adalah karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini:

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang Tidak Kembali	3	6%
Kuesioner yang Tidak Memenuhi Syarat	0	0
Kuesioner yang kembali	47	94%

Sumber : data primer, diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 50 buah, tetapi hanya 47 kuesioner yang dapat dijadikan sebagai data penelitian bagi peneliti. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 94%, hal ini dikarenakan 4 kuesioner tidak kembali karena responden tidak mengisi kuesioner yang telah dibagikan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian. Tingkat kuesioner yang tidak kembali sebesar 6%.

4.2.1.1 Deskripsi Karakteristik

Responden Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang maka dapat diketahui karakteristik responden dibawah ini:

1. Jenis kelamin

Karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
---------------	------------------	----------------

Laki-laki	27	54%
Perempuan	20	46%
Total	47	100%

Data Diolah,2022

Berdasarkan hasil olahan data mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel maka jumlah reponden terbesar adalah jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 27 orang atau sebesar 54% dan sisanya responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 20 orang atau sebesar 46% sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata responden pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

2. Strata Pendidikan

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3
Strata Pendidikan

Pendidikan	Jumlah responden	Persentase (%)
SMA/SLTA	3	6%
DIII	3	6%
Strata I (Sarjana)	35	75%
Strata 2 (Master)	13	13%
Strata 3 (Doktor)	-	-
TOTAL	47	100%

Data Diolah,2022

Berdasarkan perolehan data pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 35 responden dengan tingkat presentase sebesar (75%), pendidikan S-2 sebanyak 6 responden dengan tingkat presentase sebesar (13%), pendidikan SLTA sebanyak 3 responden dengan tingkat presentase sebesar (6%), pendidikan Diploma 3 sebanyak 3 responden dengan tingkat presentase sebesar (6%).

3. Lama kerja

Adapun karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.4
Lama kerja

Lama kerja	Jumlah responden	Persentase (%)
<1 tahun	5	11%

1-3 tahun	6	13%
>3 tahun	36	76%
Total	47	100%

Data Diolah,2022

Berdasarkan perolehan data pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar lama kerja lebih dari 3 tahun yaitu sebanyak 36 responden dengan tingkat presentase sebesar (76%), lama kerja 1-3 tahun sebanyak 6 responden dengan tingkat presentase sebesar (13%), lama kerja 1 tahun dengan jumlah responden sebesar 5 responden dengan tingkat presentase sebesar (11%).

4.2.2 Deskripsi Data Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai acuan dalam memberi bobot ditiap pertanyaan, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, variabel dapat diukur dan dijabarkan menjadi dimensi kemudian dimensi dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Instrumen pertanyaan atau pernyataan akan menghasilkan total skor bagi setiap anggota sampel yang diwakili oleh setiap nilai skor seperti instrumen berikut :

Tabel 4.5
Instrumen Skala Likert

Mutu	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (STS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(Sugiyono,2018)

Berdasarkan jumlah responden sebanyak 47 orang, maka dapat ditemukan bobot penilaian dengan menggunakan jarak yang dapat dihitung melalui nilai tertinggi dan nilai terendah dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Nilai Tertinggi = Total Responden x Bobot Tertinggi
 = 47×5
 = 235
- b. Nilai terendah = Total Responden x Bobot Terendah
 = 47×1
 = 47
- c. Jarak = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
 = $235 - 47$
 = 188
- d. Interval = Jarak / Banyak Kelas
 = $188 / 5 = 37,6$

Tabel 4.6
 Mutu Kelas Interval

No	Mutu	Interval	Kriteria
1	Sangat Tidak Setuju	47 – 84,6	Sangat Buruk
2	Tidak Setuju	84,6 – 122,2	Buruk
3	Netral	122,2 – 159,8	Sedang
4	Setuju	159,8 – 197,4	Baik
5	Sangat Setuju	197,4 – 235	Sangat Baik

4.2.3 Distribusi Jawaban Responden

Adapun distribusi jawaban dari responden yang diolah sebagai berikut:

4.2.3.1 Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan

Tabel 4.7
 Deskripsi Data Tingkat Transparansi

No	Pernyataan Variabel	Pilihan					Total
	Transparansi Pengelolaan Keuangan (X)	SS	S	N	TS	STS	
		5	4	3	2	1	

Indikator : Keterbukaan Informasi								
1	Dinas tempat/bapak ibu bekerja memberikan kemudahan dalam memberikan akses kepada Masyarakat	Frekuensi	4	40	3	0	0	47
		Nilai	20	160	9	0	0	189
2	Dinas tempat/bapak ibu bekerja memberikan informasi keuangan melalui website resmi, sosial media, koran, dsb	Frekuensi	7	36	4	0	0	47
		Nilai	35	144	12	0	0	191
3	Dinas tempat bapak/ibu bekerja menyediakan sarana untuk masyarakat saran dan keluhan	Frekuensi	3	41	3	0	0	47
		Nilai	15	164	9	0	0	188
4	Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan dapat membantu usulan/suara masyarakat	Frekuensi	9	31	7	0	0	47
		Nilai	45	124	21	0	0	190
Indikator : Kelengkapan Informasi								
5	Organisasi Pemerintah daerah menyediakan laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.	Frekuensi	9	36	2	0	0	47
		Nilai	45	144	6	0	0	195
6	Dinas tempat/bapak ibu bekerja selalu menyediakan informasi keuangan setiap periode anggaran	Frekuensi	8	34	5	0	0	47
		Nilai	40	136	15	0	0	191
7	Adanya pengumuman Kebijakan mengenai pendapatan pengelolaan dan	Frekuensi	16	29	2	0	0	47
		Nilai	80	116	6	0	0	202

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa

- b. Pada indikator keterbukaan informasi terdapat nilai dari pernyataan X1.1 dengan total nilai 189, Pernyataan X1.2 dengan total nilai 191, Pernyataan X1.3 dengan

nilai total 188, Pernyataan X1.4 dengan total nilai 190, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten pandeglang dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dengan keterbukaan informasi dimana pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dan memfasilitasi masyarakat dalam memberikan informasi dengan total nilai $X > 190$, maka dalam menerapkan keterbukaan informasi dapat di kategorikan baik

- c. Pada indikator kelengkapan informasi terdapat nilai dari Pernyataan X1.5 dengan nilai total 195, Pernyataan X1.6 dengan nilai 191 dan Pernyataan X1.7 dengan nilai total > 196 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten pandeglang dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dengan kelengkapan informasi dimana pemerintah daerah mengikuti peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah dan mempublikasikan mengenai informasi keuangan dengan lengkap dengan total nilai $X > 192$, maka kelengkapan informasi dapat di kategorikan baik
- d. Dari total pernyataan dari indikator yang telah ditetapkan dengan nilai total pernyataan > 192 maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dinyatakan baik.

4.2.3.2 Distribusi Jawaban Responden Tingkat Kinerja Pemerintah

Tabel 4.8
Deskripsi Data Kinerja

No	Pernyataan Variabel Kinerja Pemerintah (Y)	Pilihan					Total	
		SS	S	N	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
Indikator : Efisien								
1	Badan atau Organisasi melakukan pengadaan sesuai dengan sumber daya yang Dibutuhkan	Frekuensi	5	36	6	0	0	47
		Nilai	25	144	18	0	0	187
2	Badan atau Organisasi Menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki	Frekuensi	5	38	4	0	0	47
		Nilai	25	152	12	0	0	189
3	Badan atau Organisasi harus mendayagunakan setiap progra	Frekuensi	9	31	7	0	0	47

	kerja dengan anggaran secara efisien	Nilai	45	124	21	0	0	190
Indikator : Efektivitas								
4	badan atau organisasi mengelola keuangan secara efektivitas dimana semua program ditargetkan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dan menyatakan berapa besar biaya dikeluarkan untuk mencapai tujuan	Frekuensi	9	32	6	0	0	47
		Nilai	45	128	18	0	0	191
5	Badan atau organisasi melakukan pelaporan ukuran Dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program	Frekuensi	17	23	7	0	0	47
		Nilai	85	92	21	0	0	198
Indikator : Ekonomis								
6	Badan atau organisasi melakukan pembelian barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi pada harga yang rendah	Frekuensi	11	29	7	0	0	47
		Nilai	55	116	21	0	0	192
7	Badan atau organisasi melakukan pengalokasian sumber daya dengan kebutuhan	Frekuensi	6	35	6	0	0	47
		Nilai	30	140	18	0	0	188

Sumber : Data Diolah,2022

- a. Pada Indikator Efisiensi terdapat nilai dari Pernyataan Y1.1 dengan total nilai 187, Pernyataan Y1.2 dengan nilai total 189 dan Pernyataan Y1.3 dengan nilai total 190 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan selalu melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efisien dengan nilai total Y lebih besar dari > 188 , sehingga dapat dinyatakan indikator Efisiensi dapat dikatakan baik dengan memperhatikan pencapaian output yang maksimal dengan memperhatikan input yang rendah.
- b. Pada Indikator Efektivitas terdapat nilai dari Pernyataan Y1.4 dengan total nilai 191 dan Pernyataan Y1.5 dengan total nilai 198, yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan melaksanakan kinerja berdasarkan efektivitas dengan nilai total Y lebih besar dari > 194 , sehingga dapat dinyatakan indikator Efektivitas dapat dikatakan baik yaitu memperhatikan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
- c. Pada Indikator Ekonomis terdapat nilai dari Pernyataan Y1.6 dengan total nilai 192, dan Pernyataan Y1.7 dengan total nilai 188, yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan melaksanakan kinerja dengan menerapkan prinsip ekonomis dengan nilai total Y lebih besar dari > 190 ,

sehingga dapat dinyatakan indikator Eknomis dapat dikatakan baik yaitu memperhatikan dalam setiap kegiatan anggaran dapat menggunakan biaya dengan cermat.

4.3 Uji Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji validitas adalah suatu ukuran untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner yang telah dibuat. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0,388	0,288	Valid
Pengelolaan	X1.2	0,351	0,288	Valid
Keuangan	X1.3	0,454	0,288	Valid
	X1.4	0,394	0,288	Valid
	X1.5	0,381	0,288	Valid
	X1.6	0,574	0,288	Valid
	X1.7	1	0,288	Valid

Data diolah, spss 24 (2022)

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian validitas meliputi 7 item pernyataan pada variable transparansi pengelolaan keuangan (X), dapat diketahui setiap item dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Kinerja	Y1.1	0,348	0,288	Valid
	Y1.2	0,385	0,288	Valid
	Y1.3	0,724	0,288	Valid
	Y1.4	0,500	0,288	Valid
	Y1.5	0,556	0,288	Valid
	Y1.6	0,687	0,288	Valid
	Y1.7	1	0,288	Valid

Data diolah, spss 24 (2022)

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian validitas meliputi 7 item pernyataan pada variable Kinerja Instansi (Y), dapat diketahui setiap item dinyatakan valid karena rhitung > rtabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis

4.3.1.2 Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila setiap jawaban dari responden terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronsbach's Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronsbach's Alpha > 0,60. Sebaliknya jika nilai Cronsbach's Alpha < 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

Tabel 4.11
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas	Keterangan
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,727	0,60	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,855	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat di simpulkan bahwa instrumen pada kuesioner yang di gunakan untuk menjelaskan variabel transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah dapat di nyatakan handal sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data

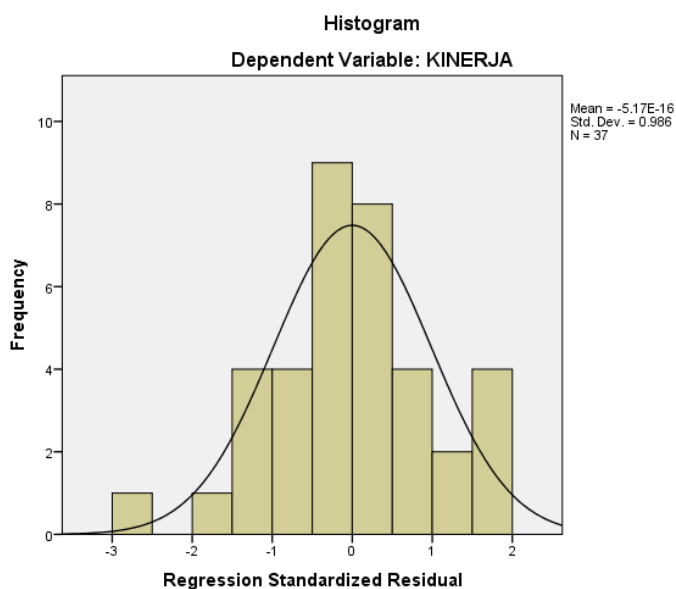
dilakukan dengan menggunakan tabel Test of Normality dengan melihat kolom Kolmogorov Smirnov, apabila nilai Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. Selain itu hasil uji normalitas dapat dibuktikan dengan analisis grafik antara lain menggunakan histogram dan *probability plot* dengan melihat penyebaran titik-titik terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016:154).

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30540309
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.077
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

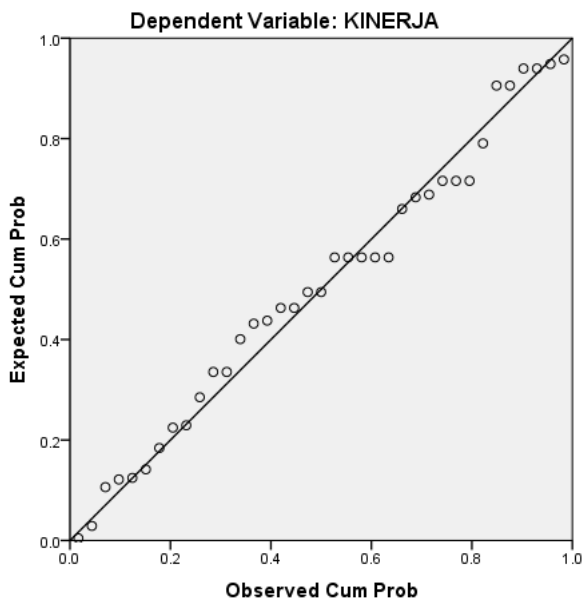
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa data yang telah diuji menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil yang memenuhi asumsi normalitas. Hal ini ditunjukkan pada nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. Hal ini juga dapat digambarkan oleh analisis grafik berikut ini:



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Histogram- Kinerja

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2

Hasil Uji *Normal Probability Plot* Kinerja

Analisis grafik digunakan sebagai cara termudah melihat normalitas dengan menganalisis grafik normal P-Plot dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Berdasarkan data yang telah diuji terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan menyebar sepanjang garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variante inflation factor* (VIF), jika nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas pada antar variabel independent.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

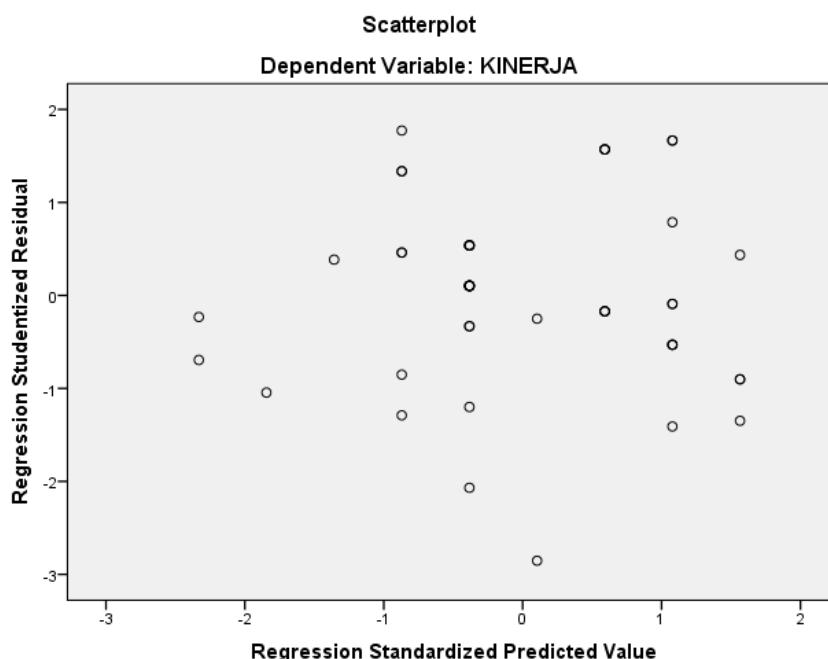
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.937	4.831		1.022	.312		
	TRANSPARANSI	.815	.167	.587	4.870	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa Tolerance >0.100 VIF < 10 hal ini menunjukkan tidak ada nilai korelasi antar variable independent yang melebihi atau lebih besar dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi linier apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadinya Homoskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk melihat ada heteroskedasitas yaitu dengan menggunakan grafik Scatterplot dan juga Uji Glejser. Pada Grafik Scatterplot, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, makai tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2016:134). Hasil uji heterokedasitas disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedasitas

Hasil analisis pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedasitas.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Model								
1	(Constant)	4.937	4.831		1.022	.312		
	TRANSPARANSI	.815	.167	.587	4.870	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas penggunaan model persamaan analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b X + e$$

$$Y = 4,937+0,815 X + e$$

Y: Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah

a : Konstanta

b : Koefisien regresi Transparansi Pengelolaan Keuangan

X : Transparansi Pengelolaan Keuangan

e : Error

Dalam persamaan regresi diatas konstanta adalah sebesar 4,937 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel transparansi pengelolaan keuangan (X) maka kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah Kota Pandeglang sebesar 4,937. Sedangkan hasil uji regresi sederhana untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien transparansi pengelolaan keuangan (X) Sebesar 0,815 berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran satu satuan maka variabel kinerja pemerintah naik sebesar 0,815 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis koefisien determinasi dan uji koefisien regresi parsial (uji t), yang bertujuan untuk mendeteksi hipotesis diterima atau ditolak

4.3.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu yaitu $0 < R^2 < 1$ (Ghozali, 2016:95).

Tabel 4.15

Uji Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 ^a	.345	.331	2.331	1.462
a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI					
b. Dependent Variable: KINERJA					

Sumber : data diolah,2022

Hasil tabel 4.15 menjelaskan ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*), dan ukuran kesalahan prediksi (*Std Error of the Estimate*). Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *R Square* sebesar 0,345 atau

34,5%. Hal ini menunjukkan 34,5% sumbangan pengaruh variabel independen transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

4.3.4.2 Uji Parsial (uji t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t yaitu apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil uji parsial (uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.937	4.831		1.022	.312		
	TRANSPARANSI	.815	.167	.587	4.870	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel 4.15 Dapat dilihat bahwa nilai t hitung peningkatan transparansi pengelolaan keuangan (X) sebesar 4,870 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel ($4,870 > 2,030$) adalah maka $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat kinerja pemerintah daerah.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

Pada Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pandeglang jika dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden mengenai tanggapan indikator-indikator dalam Transparansi dapat dilihat dari tabel Distribusi Jawaban Responden Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan :

- a. Pada indikator keterbukaan informasi terdapat nilai dari pernyataan X1.1 dengan total nilai 189, Pernyataan X1.2 dengan total nilai 191, Pernyataan X1.3 dengan nilai total 188, Pernyataan X1.4 dengan total nilai 190, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dengan keterbukaan informasi dimana pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dan memfasilitasi masyarakat dalam memberikan informasi dengan total nilai $X > 190$, maka dalam menerapkan keterbukaan informasi dapat di kategorikan baik
- b. Pada indikator kelengkapan informasi terdapat nilai dari Pernyataan X1.5 dengan nilai total 195, Pernyataan X1.6 dengan nilai 191 dan Pernyataan X1.7 dengan nilai total > 196 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten pandeglang dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan dengan kelengkapan informasi dimana pemerintah daerah mengikuti peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah dan mempublikasikan mengenai informasi keuangan dengan lengkap dengan total nilai $X > 192$, maka kelengkapan informasi dapat di kategorikan baik
- c. Dari total pernyataan dari indikator yang telah ditetapkan dengan nilai total pernyataan > 192 maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dinyatakan baik.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa para responden yaitu pegawai SKPD yang berada di kabupaten Pandeglang dengan keseluruhan jawaban responden Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan dikatakan baik dimana bahwa Dinas atau Badan dapat memberikan kemudahan akses dan kelengkapan informasi keuangan yang di berikan kepada masyarakat dengan cara adanya akses untuk informasi publik (*website*, koran, dsb), dan adanya informasi keuangan dan non keuangan yang mereka publikasikan. Hal ini diperkuat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dimana pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang terus berinovasi dalam pengemasan informasi diantaranya dengan menciptakan aplikasi Sistem Informasi Publik Terintegrasi (SIPUTRI) dan juga Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyediakan website resmi pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu www.ppid.pandeglangkab.go.id untuk memberikan kemudahan akses tersebut kepada masyarakat dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

4.4.2 Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

Pada Tingkat Kinerja Kabupaten Pandeglang jika dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden mengenai tanggapan indikator-indikator dalam Kinerja dapat dilihat dari tabel Distribusi Jawaban Responden Tingkat Kinerja :

- a. Pada Indikator Efisiensi terdapat nilai dari Pernyataan Y1.1 dengan total nilai 187, Pernyataan Y1.2 dengan nilai total 189 dan Pernyataan Y1.3 dengan nilai total 190 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan selalu melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efisien dengan nilai total Y

lebih besar dari > 188 , sehingga dapat dinyatakan indikator Efisiensi dapat dikatakan baik dengan memperhatikan pencapaian output yang maksimal dengan memperhatikan input yang rendah.

- b. Pada Indikator Efektif nilai dari Pernyataan Y1.4 dengan total nilai 191 dan Pernyataan Y1.5 dengan total nilai 198, yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan melaksanakan kinerja berdasarkan efektivitas dengan nilai total Y lebih besar dari > 194 , sehingga dapat dinyatakan indikator Efektif dapat dikatakan baik yaitu memperhatikan pencapaian hasilprogram dengan target yang ditetapkan.
- c. Pada Indikator Ekonomis terdapat nilai dari Pernyataan Y1.6 dengan total nilai 192, dan Pernyataan Y1.7 dengan total nilai 188, yang berarti dapat diartikan pada pernyataan dinas atau badan melaksanakan kinerja dengan menerapkan prinsip ekonomis dengan nilai total Y lebih besar dari > 190 , sehingga dapat dinyatakan indikator Ekonomis dapat dikatakan baik yaitu memperhatikan dalam setiap kegiatan anggaran dapat menggunakan biaya yang rendah.
- d. Dari total pernyataan dari indikator yang telah ditetapkan dengan nilai total pernyataan > 190 maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dinyatakan baik

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para responden yaitu pegawai SKPD yang berada di kabupaten Pandeglang dengan keseluruhan jawaban responden bahwa Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dikategorikan baik dimana Badan atau Dinas dalam kinerjanya menerapkan ekonomis, efisien dan efektif. Dimana yang apabila ke tiga indikator tersebut di terapkan dapat dioptimalkan dapat mempengaruhi tingkat kinerja instansi pemerintah tersebut.

4.4.3 Pengaruh Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa transparansi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Dapat dilihat bahwa nilai t hitung tingkat transparansi pengelolaan keuangan (X_1) sebesar 4,870 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini selaras dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel (0,025:45) adalah 2,030 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,870 > 2,030$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud nyata pemerintah daerah terutama SKPD di

Kabupaten Pandeglang yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjelankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi.

Disamping itu Transparansi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada masyarakat atas informasi yang diberikan pemerintah terhadap perencanaan program serta kebijakan hingga proses pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya transparansi masyarakat mampu menilai seberapa besar peran pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian dari masyarakat tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari (Elkha & Wahidawati, 2020) (Nasution, 2018) (Jatmiko, 2020), (Jatmiko, 2020), yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kinerja Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam kategori baik dilihat dari hasil pengelolaan data yang telah diolah, meskipun dalam indikator kelengkapan informasi keuangan harus ditingkatkan.
2. Tingkat Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam kategori baik meskipun demikian masih perlu diperbaiki kembali kedepannya seperti halnya yang berkaitan dengan indikator kinerja efisien, efektivitas dan ekonomis.
3. Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dibuktikan dengan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($4,870 > 2,030$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya apabila tingkat transparansi pengelolaan keuangan semakin tinggi maka kinerja pemerintah pun akan semakin meningkat dimana dalam keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, masyarakat dapat mampu menilai seberapa besar peran pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian dari masyarakat tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah:
 - Pada Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang lebih meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan hal ini bisa dengan mempublikasikan informasi mengenai laporan keuangan maupun laporan lainnya dan meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan
 - Kinerja dalam menerapkan efisien, efektif dan ekonomis dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik dan mengatur sumber daya dengan maksimal.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya:
 - Bagi para peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar menambah variabel penelitian tetapi dengan variabel yang berbeda atau variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat dilihat bahwa selain Transparansi pengelolaan keuangan terdapat juga variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dan mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hal

tersebut dimaksudkan peneliti selanjutnya dapat memberi gambaran secara spesifik mengenai program-program yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (cetakan pe). UMSIDA Press.
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guasmin, & Febrianti, D. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Sinar Manajemen*, 6(2), 129–134.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kristianten.2006. (n.d.). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kurniawati, M. M. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hata*, 8 (2), 15–27. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>
- L.P.L., K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Laga, Y. M. V. I., & Hidayat, M. T. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Lestari, U. P. (2020). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. 7(1), 43–53.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Firma Sulistyowati, H. A. purwanegara. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (ketiga). BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, (2012(, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Mbipi, S. D., Assih, P., Sumtaky, M., Terusan, J., & Dieng, R. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. 3(2), 152–158.
- Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.330>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Volume* 2(3), 149–162.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh

- Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Prof. Indra Bastian, P. D. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Purnama, F., & Nadirsyah, D. (2016). Halaman 01-15 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 1.
- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Putu, D. S. putra, & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, transparansi pengelola keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. *Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 79–92.
- Republik, Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Republik, Indonesia Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik, Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik, Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Reza, E. M. (2018). (n.d.). *Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Soleh, chabib dan suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah* (edisi digi). Fokusmedia CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136–148. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Mutriani
Alamat : Kp.Kadugajah,RT.06,RW.08
Kel/Kec.Pandeglang,Kab.Pandeglang,Banten
Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 26 April 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Pandeglang 1
• SMP : SMPN Pandeglang 1
• SMA : SMAN Pandeglang 1
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2023
Peneliti,

Tia Mutriani
022118306

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Jawaban Responden

X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	TOT AL	Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5	Y1. 6	Y1. 7
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4
5	5	4	5	5	4	4	32	4	5	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	4	5	4	4	27	3	4	3	3	4	4	3
4	4	4	4	5	5	5	31	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	5	4	5	5	31	4	4	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	31	4	4	4	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	5	30	4	4	4	4	5	4	4
4	5	5	5	4	4	5	32	4	4	4	4	5	4	4
3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5	30	5	4	5	5	5	5	4
5	4	4	3	5	4	5	30	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	5	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	5	5	4	5	31	5	4	4	4	4	4	5
4	4	4	5	5	5	5	32	4	5	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	3	4	27	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	3	4	26	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	29	4	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	3	4	24	4	3	3	3	4	3	4
4	4	4	3	3	4	5	27	4	4	3	4	3	3	3

4	4	4	3	3	3	4	25	4	3	3	4	3	3	3
4	3	3	3	4	3	4	24	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	5	5	4	5	31	4	5	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	31	3	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	5	30	4	4	4	4	5	4	4
4	5	5	5	4	4	5	32	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	5	5	30	5	4	5	5	5	5	4

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Mutriani

NPM : 022118306

Program studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Bermaksud untuk melakukan penelitian di OPD yang Bapak/Ibu pimpin mengenai “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang”

Tujuan penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan dan saya berjanji akan menjaga kerahasiaan kuesioner ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Tia Mutriani

NPM.022118306

DATA RESPONDEN

Indetitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Lama kerja :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-masing pernyataan yang tersedia pada lembaran kuisisioner. Bapak/Ibu cukup memberikan tanda pada kolom kode jawaban yang sudah tersedia. Maka diharapkan setiap pernyataan hanya ada satu jawaban.

Skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Netral (N)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

KUESIONER

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	OPD memberikan kemudahan dalam memberikan akses kepada masyarakat					
2	Organisasi Pemerintah Daerah memberikan informasi keuangan melalui website resmi, sosial media, koran, dsb					
3	Organisasi Pemerintah Daerah menyediakan sarana untuk Menyampaikan saran dan keluhan					
4	Dengan adanya transparansi anggaran ini bisa					

	membantu usulan/suara masyarakat.					
5	Organisasi Pemerintah daerah menyediakan laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.					
6	Organisasi Pemerintah Daerah selalu menyediakan informasi keuangan setiap periode anggaran					
7	Adanya pengumuman Kebijakan mengenai pendapatan pengelolaan dan aset					

KINERJA PEMERINTAH

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Badan atau Organisasi melakukan pengadaan sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan					
2	Badan atau Organisasi Menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki					
3	Badan atau Organisasi harus mendayagunakan setiap program kerja dengan anggaran secara efisien					
4	badan atau organisasi pengelolaan keuangan secara efektivitas dimana semua program ditargetkan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dan menyatakan berapa besar biaya dikeluarkan untuk mencapai tujuan					
5	Badan atau organisasi melakukan pelaporan dan dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program					
6	Badan atau organisasi melakukan pembelian barang dan jasa dengan kualitas tinggi harga terendah					
7	Badan atau organisasi melakukan pengalokasian dana sesuai kebutuhan					

Lampiran 3





Lampiran 4



Universitas Pakuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen Terakreditasi A S1 Akuntansi Terakreditasi A
 Jl. Pakuan P.O. Box 412 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 274 /WD.1/FEB-UP/III/2022 14 Maret 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KAB.PANDEGLANG
 Jl. Ahmad Satriasrijaya No.2 Pandeglang, Kecamatan Pandeglang
 Kabupaten Pandeglang, Banten 42213.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Tia Mutiari
 NPM : 022118306
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

s.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Mutiari Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).